

**ANALISIS PSIKOBIOGRAFI PRESIDEN MOON JAE-IN
DALAM PENGIMPLEMENTASIAN KEBIJAKAN LUAR
NEGERI “*SUNSHINE POLICY*” TERHADAP REUNIFIKASI
KOREA SELATAN DAN KOREA UTARA**

TESIS



Oleh

Dyn Anugerah (8092001019)

Pembimbing: Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M. Si.

**PROGRAM MAGISTER HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PSIKOBIOGRAFI PRESIDEN MOON JAE-IN DALAM
PENGIMPLEMENTASIAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI “SUNSHINE
POLICY” TERHADAP REUNIFIKASI KOREA SELATAN DAN
KOREA UTARA**



Oleh:

Dyn Anugerah

8092001019

Persetujuan Untuk Sidang Tesis pada Hari/Tanggal: Senin, 29 Januari 2024

Pembimbing Tunggal:



Dr. I Nyoman Sudira

**PROGRAM MAGISTER ILMU SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JANUARI
2024**

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Dyn Anugerah

NPM: 8092001019

Program Studi: Magister Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung

Menyatakan bahwa tesis dengan judul

“ANALISIS PSIKOBIOGRAFI PRESIDEN MOON JAE-IN DALAM
PENGIMPLEMENTASIAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI “SUNSHINE POLICY”
TERHADAP REUNIFIKASI KOREA SELATAN DAN KOREA UTARA”

Adalah benar-benar karya saya di bawah bimbingan pembimbing, serta saya tidak melakukan penjiplakan ataupun pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau tuntutan formal atau non-formal dari pihak lain yang berkaitan dengan karya saya, saya siap menanggung segala resiko, akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan

Dinyatakan : di Bandung

Tanggal : 29 Januari 2024




Dyn Anugerah

ANALISIS PSIKOBIOGRAFI PRESIDEN MOON JAE-IN DALAM PENGIMPLEMENTASIAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI “SUNSHINE POLICY” TERHADAP REUNIFIKASI KOREA SELATAN DAN KOREA UTARA

Dyn Anugerah (8092001019)
Pembimbing I: Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M. Si
Magister Hubungan Internasional
Bandung
Januari 2024

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis serta mengetahui secara mendalam mengenai relevansi faktor psikologis presiden Moon Jae-in dalam perumusan dan pengimplementasian *Sunshine Policy* dalam merealisasikan Reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara. Hambatan reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara semakin memperkuat keberadaan fakta dimana kedua negara tersebut sampai saat ini masih sulit untuk disatukan. Sejak Moon Jae-in terpilih menjadi presiden Korea Selatan yang ke- 12 ia berfokus terhadap (a) likuidasi; (b) menyelesaikan isu nuklir dengan Korea Utara, dan (c) pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu ia akan Menyusun kebijakan luar negeri dengan mengandalkan “Pendekatan pasar-sentris”, sehingga ia memutuskan untuk kembali mengimplementasikan *Sunshine Policy*.

Dalam melihat relevansi faktor psikologis presiden Moon Jae-in terhadap *sunshine policy* dalam mewujudkan reunifikasi antara Korea Selatan dan Korea Utara, penelitian ini menggunakan teori *the big five personalities* dimana memiliki lima dimensi yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi psikologis seseorang seperti *Neuroticism*, *Extraversion*, *Openness*, *Agreeableness*, dan *Conscientiousness*. Adapun penggunaan konsep *type of leaderships* untuk mengetahui tipe gaya kepemimpinan Moon Jae-in. Pendekatan konstruktivisme dalam ilmu hubungan internasional juga digunakan untuk menjelaskan maksud dari interaksi yang dilakukan oleh Moon Jae-in terhadap Korea Utara. Lebih lanjut, dalam melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh Moon Jae-in, teori liberal dan neoliberal-institusionalisme digunakan untuk mengetahui bagaimana upaya kerja sama seperti apa yang dilakukan oleh Moon Jae- in melalui *sunshine policy* dengan Korea Utara. Serta beberapa teori pendukung lainnya seperti teori perumusan dan pengimplementasian kebijakan luar negeri, dan konsep reunifikasi/integrasi.

Hasil penelitian menunjukkan jika Moon Jae-in merupakan individu yang cenderung berada pada empat aspek yaitu Extraversion (bersosialisasi), Openness to Experience (keterbukaan terhadap pengalaman), Agreeableness (keyakinan dan rasa optimisme), serta Conscientiousness (pribadi yang ambisius dan disiplin), dan cenderung tidak berada pada aspek Neuroticism (pribadi yang cemas). Moon Jae-in merupakan presiden yang gaya kepemimpinannya berada dalam kategori *director*.

Kata Kunci: Moon Jae-in, Korea Selatan, Korea Utara, *Sunshine Policy*, Reunifikasi

PSYCHOBIOGRAPHICAL ANALYSIS OF PRESIDENT MOON JAE-IN IN IMPLEMENTING THE "SUNSHINE POLICY" FOREIGN POLICY TOWARDS THE REUNIFICATION OF SOUTH AND NORTH KOREA

Dyn Anugerah (8092001019)

**First Supervisor: Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M. Si
Magister of International Relations**

Bandung

January 2024

ABSTRACT

This research was conducted to analyze and find out in-depth about the relevance of President Moon Jae-in's psychological factors in formulating and implementing the Sunshine Policy in realizing the Reunification of South Korea and North Korea. The obstacles to the reunification of South Korea and North Korea further strengthen the fact that the two countries are still difficult to unite. Since Moon Jae-in was elected as the 12th president of South Korea, he has focused on (a) liquidation; (b) resolving the nuclear issue with North Korea, and (c) economic growth. Therefore, he will develop a foreign policy relying on the "market-centric approach", so he decided to re-implement the Sunshine Policy.

In looking at the relevance of President Moon Jae-in's psychological factors to the sunshine policy in realizing reunification between South and North Korea, this study uses the theory of the Big Five personalities which has five dimensions that can be used to determine a person's psychological condition such as Neuroticism, Extraversion, Openness, Agreeableness, and Conscientiousness. The use of the concept of types of leadership to determine the type of leadership style of Moon Jae-in. The constructivist approach in international relations is also used to explain the purpose of Moon Jae-in's interactions with North Korea. Furthermore, in looking at the efforts made by Moon Jae-in, liberal and neoliberal-institutionalism theories are used to find out what kind of cooperation efforts were made by Moon Jae-in through the sunshine policy with North Korea. As well as several other supporting theories such as the theory of foreign policy formulation and implementation, and the concept of reunification/integration.

The results of this study show that Moon Jae-in is an individual who tends to be in four aspects, namely Extraversion (socializing), Openness to Experience, Agreeableness (confidence and sense of optimism), and Conscientiousness (ambitious and disciplined personalities), and tends not to be in the aspect of Neuroticism (anxious personalities). Moon Jae-in is a president whose leadership style is in the director category.

Keywords: Moon Jae-in, South Korea, North Korea, Sunshine Policy, Reunification

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas anugerah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ANALISIS PSIKOBIOGRAFI PRESIDEN MOON JAE-IN DALAM PENGIMPLEMENTASIAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI “SUNSHINE POLICY” TERHADAP REUNIFIKASI KOREA SELATAN DAN KOREA UTARA”. Penulis menyadari tanpa adanya bantuan, saran, serta bimbingan dari berbagai pihak, maka tesis ini tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan selama membimbing penulis dalam menyusun tesis,
2. Bapak Dr. A. Irawan Juniarto H., Drs., M.A. dan Bapak Y Purwadi Hermawan, Drs, M.A., Ph.D. selaku dosen penguji yang senantiasa memberikan masukan yang membangun dalam penulisan tesis,
3. Mba Nophie, Mba Indri, Mba Deti, Mba Ica, Mas Nara, Mas Marcel, Mas Nino, dan Mas Aska selaku rekan-rekan dosen dalam tim pengabdian masyarakat Unpar,
4. Kak Dyah, Echa Gondrong, dan Teh Tyas selaku teman-teman tim proyek GBV PLN,
5. Keluarga yang selalu memberi dukungan, semangat, dan doa kepada penulis,

Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu penulis terbuka terhadap masukan dan kritik yang membangun untuk mendukung tesis ini menjadi lebih baik. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandung, 29 Januari 2024

Dyn Anugerah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I LATAR BELAKANG	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	7
1.2.2 Pembatasan Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Tinjauan Pustaka	10
1.6 Kerangka Pemikiran	19
1.7 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	34
1.7.1 Metode Penelitian.....	34
1.7.2 Teknik Pengumpulan Data	35
1.8 Sistematika Pembahasan.....	35
BAB II PROFIL PSIKOBIOGRAFI PRESIDEN MOON JAE-IN.....	38
2.1 Biografi Singkat Moon Jae-in.....	38

2.2 Analisis Psikobiografi Presiden Moon Jae-in dalam Klasifikasi “ <i>The Big Five Personalities</i> ”	43
2.2.1 Aspek <i>Neuroticism</i> Presiden Moon Jae-in.....	43
2.2.2 Aspek <i>Extraversion</i> Presiden Moon Jae-in.....	45
2.2.3 Aspek <i>Openness to Experience</i> Presiden Moon Jae-in	47
2.2.4 Aspek <i>Agreeableness</i> Presiden Moon Jae-in	49
2.2.5 Aspek <i>Conscientiousness</i> Presiden Moon Jae-in	54
2.3 Penentuan Gaya Kepemimpinan Presiden Moon Jae-in dalam Model <i>Type of Leaderships</i>	56

BAB III PERSOALAN REUNIFIKASI KOREA SELATAN DAN KOREA UTARA MELALUI KEBIJAKAN LUAR NEGERI SUNSHINE POLICY . 58

3.1 Perspektif Korea Selatan terhadap Reunifikasi.....	58
3.2 Perspektif Korea Utara terhadap Reunifikasi.....	61
3.3 Sunshine Policy Rezim Kim Dae-jung.....	63
3.4 <i>Sunshine Policy</i> Rezim Roh Moo-hyun.....	70
3.5 Asal-usul Kebijakan Luar Negeri Sunshine Policy era Moon Jae-in.....	76
3.6 Proses Perumusan Kebijakan Luar Negeri <i>Sunshine Policy era Moon Jae-in</i>	79
3.7 Implementasi Kebijakan Luar Negeri <i>Sunshine Policy era Moon Jae-in</i>	88
3.8 Upaya Reunifikasi melalui <i>Sunshine Policy</i> dari Ketiga Presiden.....	101
3.9 Pemahaman Presiden Moon Jae-in mengenai Konsep Reunifikasi.....	106
3.10 <i>Political Process</i> dalam Reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara	108
3.10.1 Analisis <i>Winners- and- Losers</i> dalam Reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara.....	108
3.10.2 Analisis <i>Persistent Dissimilarities</i> dalam Reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara	114
3.10.3 Analisis <i>Borderland to Centrality</i> dalam Reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara	118

3.11 Hambatan Reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara.....	119
BAB IV RELEVANSI PSIKOLOGI MOON JAE-IN TERHADAP IMPLEMENTASI <i>SUNSHINE POLICY</i>	126
4.1 Relevansi <i>Neuroticism</i> Moon Jae-in terhadap Implementasi <i>Sunshine Policy</i>	126
4.2 Relevansi <i>Extraversion</i> Moon Jae-in terhadap Implementasi <i>Sunshine Policy</i>	128
4.3 Relevansi <i>Openness to Experience</i> Moon Jae-in terhadap Implementasi <i>Sunshine Policy</i>	131
4.4 Relevansi <i>Agreeableness</i> Moon Jae-in terhadap Implementasi <i>Sunshine Policy</i>	133
4.5 Relevansi <i>Conscientiousness</i> terhadap Implementasi <i>Sunshine Policy</i>	135
4.6 Expert Judgment Psikolog	137
BAB V.....	140
KESIMPULAN DAN SARAN.....	140
DAFTAR PUSTAKA.....	143
LAMPIRAN	A

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tugas dan Operasional Kabinet di Korea Utara dimodifikasi dari 111

Tabel 4. 1 Daftar Orang-orang yang diberikan Kepercayaan oleh Moon-Jae-in. 134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Kawasan Kaesong Industrial Complex (Hyundai Asan’s First Development Plant, 60 kilometer dari Seoul, 160 kilometer dari Pyongyang, dan 1,5 kilometer dari garis batas sebelah utara).....	67
Gambar 3. 2 Sebaran Partai Politik di Parlemen Nasional pemerintahan Presiden Moon Jae-in.....	87
Gambar 3. 3 Rencana Lima Tahun Urusan Negara Presiden Moon Jae-in	89
Gambar 3. 4 Daftar Keterlibatan Keanggotaan Korea Selatan dan Korea Utara di dalam Organisasi Internasional	95
Gambar 3. 5 Pandangan Publik Korea Selatan mengenai Perlunya dilakukan Reunifikasi.....	115
Gambar 3. 6 Pandangan Publik Korea Selatan mengenai Tidak Perlunya.....	115
Gambar 4. 1 Data Peluncuran Rudal dan Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara.	126

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Inform Consent Responden.....	A
---	---

BAB I LATAR BELAKANG

1.1 Pendahuluan

Hambatan reunifikasi antara Korea Selatan dan Korea Utara semakin memperkuat keberadaan fakta dimana kedua negara tersebut sampai saat ini masih sulit untuk disatukan, yang pada hakekatnya kedua negara tersebut memiliki latar belakang suku, budaya, bahasa, dan sejarah yang sama, seharusnya nya keempat faktor tersebut dapat menjadi faktor pendukung terjadinya unifikasi kedua negara semenanjung tersebut, seperti yang terjadi antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Sebelumnya perlu diketahui juga mengenai sejarah, penyebab, serta bagaimana bisa terjadi pembagian negara di Semenanjung Korea. Faktor pertama terjadi pembagian kedua Korea ketika adanya “pendudukan” yang dilakukan oleh pasukan bersenjata dari pihak eksternal dimana wilayah Utara diduduki oleh pasukan Uni Soviet dan wilayah Selatan diduduki oleh pasukan Amerika Serikat, faktor kedua adanya keretakan politik antara masyarakat Korea pada tahun 1946, faktor terakhir adalah pecahnya komisi gabungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang diadakan pada tahun 1946 dan 1947 dimana bertanggungjawab atas pembentukan pemerintahan yang independen.¹

Faktanya isu kemerdekaan Korea sudah didiskusikan diantara kelompok persekutuan bahkan sebelum Korea mendapatkan kemerdekaannya dari

¹ *Ministry of Unification Institute for Unification Education (2014) “Understanding Korean Unification” Seoul: Education Development Department of Institute for Unification Education*, hal 29

penjajahan Jepang. Pada tahun 1943, di masa perang dunia 2 mencapai puncaknya, Presiden Amerika Serikat kala itu F. D. Roosevelt, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, dan Generalissimo Republik Cina Chiang Kai-shek melakukan pertemuan di Cairo dimana mereka sepakat jika Korea harus bebas dan merdeka.

Merujuk pada keputusan yang dibuat di Konferensi Yalta yang diselenggarakan pada bulan Februari tahun 1945, Uni Soviet mendeklarasikan perang terhadap Jepang dan mengirim pasukan militernya ke Manchukuo dan Semenanjung Korea. Kemudian pada 11 Agustus tahun 1945 Amerika Serikat menawarkan pendudukan pasukan Amerika di Wilayah Selatan untuk mencegah pengaruh komunis dari pasukan Soviet yang sedang mengambil alih Semenanjung Korea dalam usahanya untuk mengalahkan pasukan militer Jepang yang tersisa. Pada akhir masa perang dunia 2 Agustus tahun 1945, Korea menjadi salah satu negara yang merdeka dari penjajahan. Namun kekalahan yang dialami oleh pasukan militer Jepang nyatanya tidak menghasilkan perkembangan apapun terhadap negara tersebut kala itu, justru akibat dari dampak perang dingin yang secara dramatis sehingga pada akhirnya negara tersebut terbagi menjadi wilayah utara dan selatan pada akhir abad 20. Sehingga konsekuensi yang harus diterima ialah pasukan militer Uni Soviet mengambil alih wilayah semenanjung utara dan pasukan militer Amerika Serikat mengambil alih wilayah semenanjung selatan.

Pada saat isu penyatuan kedua Korea dibahas di PBB pada bulan September tahun 1947, mereka memberikan opsi kepada negara tersebut agar bisa melakukan

unifikasi dibawah satu pemerintahan melalui pengawasan majelis umum PBB, sayangnya Uni Soviet dan Korea Utara menolak opsi tersebut. Konsekuensinya pada bulan Mei tahun 1948 majelis umum PBB hanya melakukan pertemuan di wilayah Selatan sehingga pada tanggal 15 Agustus di tahun yang sama pemerintahan Republik Korea resmi didirikan. Sementara itu rezim komunis yang juga sedang diatur di wilayah Utara berhasil didirikan pada tanggal 9 September tahun 1948.²

Meskipun Semenanjung Korea sudah mendapatkan kemerdekaannya dari kolonialisme Jepang pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, namun faktanya mereka tidak bisa dikatakan sebagai pemenang dan tidak bisa merasakan rasanya kemenangan dari penjajahan, melainkan harus merasakan pembagian yang dilakukan oleh pasukan Uni Soviet di wilayah Utara dan pasukan Amerika Serikat di Wilayah Selatan. Sehingga efek samping dari kehadiran dua pasukan militer besar di semenanjung tersebut membuat daerah itu menjadi pusran politik yang kejam. Pasukan militer Soviet pada saat itu memberikan dukungan yang kuat terhadap Kim Il-sung serta melaksanakan langkah-langkah reformasi serta adanya gerakan nasionalis industry. Di sisi lain pasukan militer Amerika Serikat mendukung kelompok ideologi Nasionalis di Selatan, termasuk Partai Demokratik Korea.³

Adapun pembagian Korea terjadi kedalam tiga cara yang berbeda. **Fase pertama, pembagian regional**, di tahun 1945 negara semenanjung ini terbagi

² *Ibid*, hal 25-26

³ *Loc-Cit*, hal 30-31

dibawah kekuasaan militer Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pembagian regional ini mengharuskan kedua belah pihak untuk beroperasi di bawah struktur politik yang berbeda. **Fase Kedua, pembagian sistem politik**, saat wilayah Utara mengimplementasikan kebijakan nasionalisasi industri dan kebijakan sosialis lainnya, wilayah Selatan dikendalikan dibawah sistem kapitalis berdasarkan pada sistem demokrasi liberal. **Fase Ketiga, pembagian sistem pemerintahan**, dengan kebijakan Uni Soviet dan Korea Utara menolak resolusi yang ditawarkan oleh PBB untuk diadakan *single general election*, sehingga *election* tersebut hanya diselenggarakan oleh pihak Selatan. Kemudian Republik Korea resmi didirikan pada tanggal 15 Agustus tahun 1948, dan PBB hanya mengakui pemerintahan negara tersebut secara hukum yang ada di wilayah semenanjung. Sementara pada tanggal 8 September tahun 1948 Republik Rakyat Demokratik Korea Utara resmi didirikan di wilayah Utara.⁴

Selain beberapa faktor yang telah disebutkan diatas, faktor yang semakin memperkuat pembagian Korea adalah *Korean War* dimana pasukan Utara menginvasi wilayah Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1950. *Korean War* yang terjadi pada tahun 1950-1953 juga ada andil terhadap perkembangan situasi yang terjadi di Korea Selatan dan Korea Utara. Adapun maksud tertentu dibalik terjadinya *Korean War*, **Pertama**, adanya kompetisi dua negara *super power* yang menjadi dalang dari terjadinya *Cold War* yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet (sekarang Rusia); **Kedua**, adanya kompetisi regional untuk mengendalikan politik

⁴ *Ibid*, hal 31

di Korea.⁵ Sebelum *Korean War* terjadi, pada bulan Maret dan April tahun 1949 Kim Il Sung berkunjung ke Uni Soviet ia menekan Stalin agar memberikan dukungannya terhadap invasi yang akan dilakukan oleh Korea Utara ke Korea Selatan. Namun Stalin tidak setuju mengenai keinginan Kim Il Sung, Stalin tidak ingin membuat aksi yang sekiranya akan memprovokasi Amerika Serikat atau Korea Selatan kedalam peperangan, selama tahun 1949 Kim Il Sung tetap melakukan pembicaraan agar Stalin memberikan dukungan militer untuk Korea Utara.⁶

Pada September tahun 1949, Stalin dan kelompok sekutu Soviet mulai mempertimbangkan keuntungan dari aksi militer. Ada empat alasan dibalik pemikiran Stalin tersebut. **Pertama**, kemenangan dari pasukan Komunis Cina dalam perang saudara sehingga meningkatkan kekuatan blok Komunis di Asia timur. **Kedua**, Uni Soviet sukses meledakan bom atom pertama mereka pada bulan September dan usahanya juga dalam menghilangkan cacat besar dalam perang dengan Amerika Serikat. **Ketiga**, pendirian NATO dan memburuknya hubungan dengan blok Barat sehingga mengurangi prospek dalam mencapai tujuan kebijakan luar negeri Soviet melalui diplomasi. **Keempat**, merasakan adanya pelemahan tekad Washington untuk berperang atas Korea. Selanjutnya terdapat dua peristiwa yang terjadi pada tahun 1950 dimana hal tersebut memberikan sinyal kepada kelompok Komunis apabila Amerika Serikat tidak akan bertarung untuk membela Korea. **Pertama**, pada tanggal 12 Januari tahun 1950 sekretariat kenegaraan Dean

⁵ Carter Malkasian (2001), "*The Korean War 1950-1953*" (Oxford: Osprey Publishing), hal 11

⁶ *Ibid*, hal 15

Acheson membuat sebuah pidato dihadapan *National Press Club* apabila Korea Selatan bukan hal menarik untuk Amerika Serikat, ia menegaskan apabila Amerika Serikat dalam membentuk parameter pertahanan di wilayah pasifik dari wilayah Aleut, ke Jepang, ke Ryukyu, hingga Philipina, sementara Korea Selatan tidak termasuk kedalam list parameter pertahanan mereka. Hal tersebut sudah terlihat dimana adanya kekurangan dukungan militer kepada Korea Selatan. **Kedua**, pada tanggal 19 Januari di tahun yang sama *the House of Representatives* nyaris menolak tagihan bantuan yang diajukan oleh pemerintah Korea Selatan, hal tersebut semakin menunjukkan tanggapan apabila Amerika Serikat sangat tidak peduli terhadap Korea Selatan.⁷

Tanggal 25 Juni tahun 1950, akhirnya Korea Utara menginvasi Korea Selatan, dari propaganda yang dilakukan oleh Korea Utara mereka mengklaim apabila serangan itu sebagai terhadap serangan yang awalnya dilakukan oleh Korea Selatan. Bagi Presiden Truman invasi yang dilakukan oleh Korea Utara jelas mengindikasikan apabila adanya keinginan dari kelompok komunis untuk memanfaatkan agresi tersebut dalam upayanya untuk memperluas pengaruh mereka. Bagi Truman dan Acheson mereka mempercayai apabila Korea adalah sebuah ujian bagi komitmen yang dimiliki oleh kelompok Barat untuk berdiri melawan agresi Komunis. Perlu diketahui invasi Korea Utara dipandang sebagai ancaman yang jelas bagi kepentingan Amerika, karena apabila Korea Selatan tertaktukan, pemerintahan komunis akan mengendalikan seluruh daratan utama Asia Timur (kecuali Hong kong), bagian utara Thailand menyusul adanya

⁷ *Ibid*, hal 16

pemberontakan komunis sedang berlangsung di Malaysia dan Laos.

Melihat kondisi tersebut Dean Acheson dan Presiden Truman segera membawa permasalahan ini ke hadapan *Security Council* PBB, tanpa ada pengaruh Uni Soviet di *council* tersebut PBB langsung membuat resolusi dan menyangkan invasi yang dilakukan oleh Korea Utara. Resolusi yang dibuat oleh PBB adalah mendesak agar menarik pasukan militer Korea Utara menuju area Paralel ke-38. Resolusi kedua ialah perlunya langkah-langkah militer yang mendesak dan merekomendasikan agar negara-negara anggota turut membantu Korea Selatan untuk mengusir serangan yang dilakukan oleh Korea Utara dan memulihkan perdamaian.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Perjalanan yang dilalui oleh Moon Jae-in untuk menjadi Presiden Korea Selatan dilalui dengan secara dramatis, dimana pendahulunya Park Geun-hye terlibat dalam kasus korupsi pada tahun 2016 dan diikuti dengan adanya demonstrasi secara nasional yang memaksa Presiden Park untuk mundur, tidak lama kemudian akhirnya ia dimakzulkan dan digulingkan dari jabatannya. Pada bulan Mei tahun 2017 diselenggarakan pemilu khusus, dan Moon Jae-in terpilih sebagai Presiden Korea Selatan ke-12. Baru saja terpilih menjadi presiden, Moon harus langsung menghadapi permasalahan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang sedang berusaha mengembangkan program senjata nuklir. Selama ia mendiskusikan masalah tersebut dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, ia juga menegaskan akan memiliki ketegasan dalam hal negosiasi dan strategi

militer. Pada bulan juni tahun 2017 Presiden Moon menghentikan *Terminal High Altitude Air Defence System* (THAAD) yang dipasang oleh Amerika Serikat dan menunggu hasil tinjauan lingkungan yang sedang dilakukan. Beberapa bulan kemudian dalam pidato kenegaraannya di hadapan Majelis Nasional, Presiden Moon menegaskan kembali tujuannya dalam mengeliminasi senjata-senja nuklir yang terletak di sepanjang Semenanjung Korea, dan ia juga menambahkan bahwa pengembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara tidak dapat diterima karena adanya keterikatan perjanjian antar kedua negara Korea terhadap denuklirisasi.⁸

Semenjak Moon Jae-in memegang jabatan kepresidenan, ia berfokus kedalam tiga point utama kebijakan: **(a) likuidasi; (b) menyelesaikan isu nuklir dengan Korea Utara, dan (c) pertumbuhan ekonomi.** Untuk isu nuklir Korea Utara mengalami progress yang dinilai sangat minim untuk menuju denuklirisasi, meskipun telah diselenggarakan pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, hasilnya dukungan publik terhadap rekonsiliasi antara Korea Selatan dan Korea Utara menjadi berkurang.⁹ Kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara yang dibuat selama masa kepresidenan Moon Jae-in dapat diasumsikan dibuat dengan tipe “liberal”. Pendekatan yang digunakan oleh Presiden Moon Jae-in ialah “**Pendekatan pasar- sentris**” dimana menekankan adanya insentif utama kemakmuran bersama di Semenanjung Korea,

⁸ Dr. Nilufer Ruzgar, “*Moon Jae In: A Contemporary Strategic and Visionary Leader*” *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, 28 Februari 2019

⁹ Sung. D. Hahm, Uk Heo, “*President Moon Jae-in at Midterm: What Affects Public Support for Moon Jae-in?*” *Journal of Asian and African Studies*, 30 Maret 2020

serta berhubungan juga dengan konsep “*economic peace*” dan asas “kemakmuran bersama” merupakan satu visi dari Kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara yang dibuat oleh dirinya.¹⁰

Meskipun terdapat progress yang kurang meyakinkan dalam salah satu fokus kebijakan yang dijadikan prioritas oleh Presiden Moon Jae-in mengenai isu nuklir Korea Utara, ia tetap melanjutkan usahanya dalam mewujudkan kebijakan damai terhadap Korea Utara. Sehingga Moon tidak akan mengubah kebijakannya terlepas dari hasil seperti apa yang akan didapatkan.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti hanya berfokus kepada kebijakan luar negeri Korea Selatan. Kebijakan luar negeri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah “*Sunshine Policy*” terkait upaya dalam melakukan unifikasi antara Korea Selatan dengan Korea Utara yang mulai diimplementasikan pasca dilakukan pertemuan di Panunjom pada tanggal 27 April tahun 2018 yang menghasilkan deklarasi damai, serta kesempatan untuk melakukan reunifikasi di Semenanjung Korea. Untuk pembatasan waktu dalam penelitian ini dibatasi dari tahun 2018 hingga tahun 2020 dimana selama 3 tahun tersebut Presiden Moon dinilai aktif menyuarakan usahanya dalam menyatukan kedua Korea. Fokus penelitian ini akan berfokus terhadap peran Presiden Moon Jae-in, sebagai pengambil keputusan dibalik kebijakan tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

¹⁰ Mosler, Hannes B. “*Lessons Learned? South Korea’s Foreign Policy toward North Korea under the Moon Jae-in administration*”. *Institute of East Asian Studies IN-EAST, University of Duisburg-Essen*. 2022, Hlm 14, diakses pada tanggal 3 Agustus 2023 dari <https://www.econstor.eu/handle/10419/250065>

Berdasarkan uraian masalah yang telah disebutkan pada bagian deskripsi masalah, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian terkait dengan masalah tersebut yaitu “Bagaimana relevansi profil psikologis Presiden Moon Jae-in terhadap proses reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara melalui *Sunshine Policy* tahun 2018-2020?”

1.3 Tujuan Penelitian

Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- Mengetahui kondisi psikologis individu melalui analisis psikobiografi;
- Mengetahui peristiwa yang dilalui di dalam kehidupan Presiden Moon Jae-in yang berperan dalam pembentukan kepribadiannya
- Mengetahui secara mendalam mengenai relevansi faktor psikologis Presiden Moon Jae-in dalam perumusan dan pengimplementasian kebijakan luar negeri *Sunshine Policy* tahun 2018-2020
- Mengetahui secara mendalam mengenai upaya reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara yang dilakukan Presiden Moon Jae-in melalui kebijakan luar negeri *Sunshine Policy* tahun 2018-2020

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan kontribusi terhadap penelitian dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional dan memenuhi salah satu prasyarat kelulusan Tingkat Magister (S2), yaitu pembuatan dan pelaksanaan sidang Tesis

1.5 Tinjauan Pustaka

Psychosocial Aspects of Korean Reunification: Explicit and Implicit National Attitudes and Identity of South Koreans and North Korean Defectors

Artikel jurnal yang ditulis oleh Do-Yeong Kim dan Hye-Jung Oh pada tahun 2001 menjelaskan apabila lebih dari 50 tahun terakhir sejak perang Korea berakhir, kedua Korea telah ditandai dengan perbedaan sosial yang radikal, system politik, ideologi, dan system ekonomi. Dimana daerah Selatan telah menganut pemikiran dari demokrasi liberal di dalam kehidupan bermasyarakatnya dengan sistem ekonomi pasar. Sementara daerah Utara menempuh sistem autoriti daripada ideologi sosialis, mengendalikan negara dengan kuat yang dipimpin penuh oleh Kim, Il-Sung dan diteruskan oleh anak nya Kim Jung-Il yang mempratikan kepimimpinannya seperti tuhan. Melihat dari isu psikologi penyatuan kedua Korea memegang alur yang meyakinkan untuk masyarakat Korea Selatan dan Korea Utara, namun demikian banyak orang yang berpendapat apabila akan terjadi lebih banyak tantangan ketimbang solusi yang tercipta. Harapan penyatuan kedua Korea yang memperlihatkan kesempatan untuk kedua negara bisa bersatu hanya menjadi mimpi selama lebih dari setengah abad. Padahal berdasarkan keyakinan mereka terhadap penyatuan Korea dinilai dapat lebih memberikan kemakmuran setidaknya untuk saat ini ketimbang dengan sistem pembagian kedua negara.

Menurut mereka tidak ada keraguan apabila kedua Korea memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bersatu baik itu dari pihak Utara dan Selatan. Namun dalam jurnal yang mereka tulis ditemukan adanya perpecahan yang nyata dalam sikap implisit terhadap Utara dan Selatan bagi masyarakat Korea Selatan dan Korea Utara yang bahkan secara sukarela membelot ke Korea Selatan. Dengan demikian hasil ini bisa

jadi menyiratkan perjalanan Panjang bagi kedua bangsa Korea untuk mencapai tujuan akhirnya yaitu penyatuan secara piskosial di kalangan masyarakatnya.

Cultural Identity and Cultural Policy in South Korea

Artikel jurnal berikutnya yang ditulis oleh Haksoon Yim pada tahun 2002 menggambarkan bagaimana pemerintah Korea Selatan harus mencari solusi atau cara ketika berurusan dengan isu mengenai identitas budaya melalui evolusi budaya kebijakan publik yang terjadi di negara nya. Isu mengenai identitas budaya muncul dari rasa diskontinuitas budaya diantara budaya tradisional orang Korea dan budaya kontemporer semenjak mendapatkan pengaruh dari penjajahan yang dilakukan oleh Bangsa Jepang (1910-1945), pembagian Korea (1945-sekarang), Perang Korea (1950- 1953), dan cepatnya proses modernisasi serta munculnya tindakan diskriminasi sebagai dampak dari masuknya budaya barat. Salah satu karakteristik Korea Selatan yang paling menonjol dan sampai saat ini masih berlangsung dan ada ialah sebagai negara kesatuan disamping banyaknya invasi dan pendudukan, Korea Selatan masih bertahan dengan karakteristik homogeneous dan telah dikenal sebagai *Han minjok* yang berarti “Negara Korea”. Lebih jauh lagi ketika Korea telah terbagi menjadi dua negara, namun kesadaran mereka telah terkonstruksi dengan prinsip “*Han minjok*” tersebut. Hasilnya isu identitas budaya memang memberikan pengaruh terhadap budaya dalam dasar-dasar penyusunan kebijakan publik pada sektor pemerintah. Dalam prosesnya nilai instrumental dari suatu budaya dinilai sangat berpengaruh terhadap aspek pembangunan ekonomi dan strata sosial yang telah ditekankan. Karena semakin banyaknya pengaruh dari budaya nasionalisme, budaya tradisional telah dipertimbangkan tidak hanya dijadikan sebagai akar dari identitas budaya orang Korea namun juga dijadikan

sebagai solusi untuk isu-isu identitas budaya. Sehingga dalam konteks budaya penyusunan kebijakan publik, isu identitas budaya telah ditafsirkan ulang dan dimobilisasi secara berbeda sesuai dengan perubahan yang terjadi di lingkungan politik, ekonomi, dan budaya di mana telah dilaksanakan dan dirumuskan dalam budaya penyusunan kebijakan publik. Isu identitas budaya tetap berpengaruh dalam membentuk budaya dalam penyusunan kebijakan publik secara keseluruhan.

Chinese Attitudes Toward Korean Unification

Artikel jurnal selanjutnya ditulis oleh Bonnie S. Glaser dan Yun Sun mengatakan apabila Beijing secara resmi mendukung upaya penyatuan kedua negara semenanjung Korea dibawah kondisi apabila memang penyatuan tersebut bisa menjadikan kedua negara tersebut “damai dan independent”. Masuknya Cina terhadap persoalan penyatuan Korea dimulai dari pada saat kepemimpinan negara tersebut dibawah generasi Deng Xiaoping yang telah memberikan dukungannya untuk penyatuan kedua Korea. Dimulai pada tahun 1982 selama kunjungannya ke Korea Utara yang juga menjadi kunjungan luar negeri nya yang terakhir, Deng mengatakan apabila ia “memberikan dukungan tegas terhadap upaya yang dilakukan oleh Partai Pekerja Korea, pemerintah Korea Utara, dan rakyat untuk penyatuan yang ditentukan oleh diri sendiri dan damai”, selanjutnya pada tahun 2001 presiden Cina Jiang Zemin juga membuat janji yang sama selama pertemuannya dengan delegasi senior Korea Utara di Beijing. Selama dua periodenya sebagai presiden, Hu Jintao menyuarakan dukungan masyarakat Cina untuk penyatuan akhir daripada Korea Selatan dan Korea Utara di berbagai kesempatan, termasuk pada saat memberikan pidatonya kepada Majelis Umum Korea Selatan pada tahun 2005 dan kepada media Amerika Serikat pada tahun

2011 sebelum kunjungan kenegaraannya menuju Washington. Presiden Xi Jinping memberikan juga memberikan dukungan terbuka terhadap penyatuan kedua negara Semenanjung Korea di dua pertemuan puncaknya ketika saat itu bersama Presiden Park Geun-hye. Selama kunjungan di Seoul pada Juli 2014, Presiden Xi memuji di depan publik mengenai peningkatan rasa saling mempercayai selama proses advokasi yang oleh Presiden Park sehingga Cina juga meningkatkan dukungannya terhadap hubungan kedua negara Selatan dan Utara dalam upayanya menggapai rekonsiliasi dan kerjasama yang tentu saja akan mengarahkan kepada keinginan diri sendiri untuk menciptakan penyatuan yang penuh damai. Meskipun Cina tetap secara resmi memberikan dukungan terhadap penyatuan kedua negara Semenanjung Korea walaupun bisa saja di lain waktu beban dan bahaya status quo di semenanjung tersebut dapat meningkat, Beijing masih menilai bahwa kemungkinan penyatuan masih berpotensi lebih besar ketimbang risiko yang ditimbulkannya.

Modeling the Economic Impacts of Korean Unification

Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Warwick J. McKibbin, Jong Wha Lee, Weifeng Liu, dan Cheol Jong Song disebutkan bahwa ditengah-tengah kesulitan situasi ekonomi yang melanda Korea Utara masih tetap memperkenalkan program senjata nuklir yang mereka miliki dan cenderung untuk tidak melakukan denuklirisasi setidaknya untuk kelangsungan masa depan dan menghindari sanksi keras yang diberikan oleh Amerika Serikat dan PBB. Para pemimpin Korea Utara sepertinya akan tetap melanjutkan kebijakan tersebut dan menghindari reformasi domestik serta pembangunan fasilitas senjata nuklir dan misil jarak jauh. Korea Utara bisa saja mengadopsi secara serius sistem reformasi pasar dan membuka

selebar-lebarnya ekonomi mereka yang dinilai dapat menuntun mereka terhadap penyatuannya dengan Korea Selatan secara bertahap. Namun disisi lain rezim Korea Utara bisa saja mengalami kolaps akan tetapi hal tersebut sangat sulit diprediksi kapan dan bagaimana keadaan kolaps tersebut akan terjadi. Semenjak pembagian sistem politik di negara Semenanjung Korea pada tahun 1948, Korea Utara mengadopsi sistem penanaman ekonomi terpusat lain hal dengan Korea Selatan yang memilih sistem ekonomi berbasis pasar. Setengah abad kemudian kedua negara harus dihadapkan dengan kesenjangan yang amat besar diantara sistem ekonominya. Pada tahun 1950 Korea Utara memiliki tingkat GDP yang cenderung sama dengan pendapatan Korea Selatan perkapitanya, akan tetapi jarak keduanya semakin melebar dari waktu ke waktu. Bank Korea memberikan estimasi apabila pendapatan perkapita Korea Utara berada diangka 1,200 US dollar yang berarti 5 persen dibawah pendapatan perkapita Korea Selatan pada tahun 2015.

The Mobilizing Power of the President: South Korean Presidents' Policy-making vis-à-vis North Korea

Artikel jurnal yang ditulis oleh Hyang-Loo Lee ini berusaha membandingkan dua presiden Korea Selatan yaitu Kim Dae-jung dan Roh Moo-hyun. Kemudian dalam pembuatan kebijakan vis-à-vis terhadap Korea Utara hal tersebut telah dianggap menjadi tugas utama Presiden Korea Selatan untuk mencapai keberhasilan. Sebab bukan hanya reputasi domestik sebagai pemimpin saja, namun juga sebagai tanggapan serius negara terhadap keamanan nasional dan internasional. Pada 18 september 2018 presiden Moon sebagai pemimpin Korea Selatan tiba di Pyongyang Korea Utara dalam upayanya menjadi bagian dalam konferensi summit ketiga dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un menyusul pertemuan yang telah

dilakukan sebelumnya pada bulan April dan Mei di Panmunjom yang menjadi bagian zona demiliterisasi.

Ketika itu presiden Amerika Serikat saat masih dijabat oleh Donald Trump sebelumnya sudah bertemu dengan Kim Jong-un pada Mei tanggal 22 tahun 2018 di Singapura, pertemuan tersebut menjadi yang pertama kali dilakukan antara Amerika Serikat dan Korea Utara yang pernah dilakukan dalam perkembangan sejarah Korea. Pembuatan kebijakan vis-à-vis yang dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan terhadap Korea Utara tidak hanya mempunyai kekuatan untuk menuntukan apakah semenanjung Korea tetap damai atau tidak, tetapi juga dapat melakukan tugas nasional yang telah lama diinginkan. Namun, pengambilan kebijakan pada satu masalah tidak selalu sama karena hal tersebut ditangani oleh masing-masing presiden dan perlu diketahui apabila presiden menjadi aktor kunci dalam pembuatan kebijakan. Terutama karena pengambilan kebijakan terhadap Korea Utara adalah salah satu masalah yang sangat mencerminkan perpecahan politik antara pemerintahan konservatif dan progresif karena persepsi yang berbeda dari Korea Utara. Presiden Korea Selatan telah memegang kekuasaan yang cukup besar dalam pemerintahan mereka, dan peran seorang individu dari presiden dinilai sangat penting dalam pembuatan kebijakan, terutama ketika itu berlaku untuk membuat hubungan dengan Korea Utara yang terkait erat dengan keamanan nasional dan masalah sosial internal. Antara presiden Kim Dae-jung dan presiden Roh Moo-hyun ditemukan bahwa mereka menunjukkan gaya kepemimpinan yang agak berbeda dalam operasi pembuatan kebijakan ini, meskipun mereka berdua melakukan kebijakan mereka dalam kerangka kebijakan yang sama (yaitu

keterlibatan).

Social Integration and Well-being of North Korean Migrants in South Korea

Artikel jurnal yang ditulis oleh In-Jin Yoon menjelaskan dimana adanya keinginan terciptanya integrasi sosial dan kesejahteraan yang dialami oleh imigran Korea Utara di Korea Selatan. Tercatat apabila gelombang imigran terbesar Korea Utara yang bermigrasi menuju Korea Selatan terjadi pada pertengahan 1990-an dan penempatan mereka masih berlanjut hingga lebih dari 20 tahun. Kebijakan pemerintahan sebelumnya memang ditujukan kepada imigran Korea Utara dan cenderung berfokus untuk membantu dan menempatkan mereka di lingkungan masyarakat Korea Selatan. Namun demikian banyaknya perubahan-perubahan di lingkungan kebijakan akhir-akhir ini telah membuat pemerintah kesulitan untuk memberikan dukungan yang ditargetkan kepada kelompok migran. Misalnya terdapat kritik yang berkembang terhadap kebijakan pemerintah bahwa tingkat dukungan untuk kelompok ini berlebihan dibandingkan dengan kelompok orang lain seperti mereka yang berpenghasilan rendah, anggota rumah tangga berkepala tunggal, atau memiliki disabilitas. Argument lainnya adalah bahwa program dukungan pemerintah seperti perlindungan biaya hidup minimum, memperdalam ketergantungan kesejahteraan dan pada akhirnya menghambat swasembada. Dengan kata lain kebijakan pemerintah perlu direvisi untuk mengakomodasi perubahan dan tuntutan baru dalam lingkungan kebijakan. Sebelum pertengahan 1990-an kompetisi intens antara Korea Selatan dan Korea Utara, banyak juga pembelot Korea Utara yang mengklaim bahwa mereka telah melarikan diri dari Korea Utara untuk mencari kebebasan beberapa tingkat utilitas

politik kepada pemerintah Korea Selatan. Migran Korea Utara sangat percaya apabila mereka mengidentifikasi dirinya sebagai warga negara Korea Selatan dan sangat percaya bahwa mereka dapat mencapai status yang sama dengan orang asli Korea Selatan. Namun pada kenyataannya aspek budaya dan identitas Korea Utara tidak diakui atau diterima dalam masyarakat Korea Selatan dan mereka juga merasakan tekanan kuat untuk berasimilasi dengan budaya dan identitas Korea Selatan. Kemudian menurut analisis data mengungkapkan rendahnya tingkat integrasi sistemik dan kondisi kesehatan migran Korea Utara yang buruk. Selain itu orang Korea Utara cenderung memiliki jejaring sosial yang sempit dengan penduduk asli sehingga mereka mengalami kekurangan asupan informasi, peluang, dan integrasi alami antar mereka. Kemudian secara psikologis, migran Korea Utara mengalami kesulitan dalam mengembangkan hubungan dengan penduduk Korea Selatan karena prasangka banyak penduduk terhadap dan rasa superioritas sosial atas migran Korea Utara. Dari keenam artikel jurnal yang telah dipaparkan diatas secara umum hanya menggambarkan bagaimana kondisi psikologis masyarakat, efek pengaruh sosial dan budaya yang ditimbulkan, dan kondisi ekonomi yang akan tercipta apabila Korea Selatan dan Korea Utara melakukan reunifikasi. Namun dari keenam jurnal tersebut belum mengungkapkan mengenai faktor-faktor kepribadian Presiden Moon Jae-in terhadap proses perumusan kebijakan luar negeri *Korean Peninsula Policy* meskipun tetap gagal untuk menciptakan reunifikasi antara Korea Selatan dan Korea Utara. Oleh karena itu, berkaitan dengan topik penelitian ini, peneliti

melanjutkan analisis mengenai faktor-faktor kepribadian Presiden Moon Jae-in terhadap proses kebijakan luar negeri *Korean Peninsula Policy*, melalui analisis psikobiografi.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam menjawab rumusan masalah yang dicantumkan pada penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan beberapa kerangka pemikiran. Hubungan Internasional dianggap muncul sebagai bidang akademik dengan masalah praktis yang dibahas di dalamnya yaitu perang dan perdamaian.¹¹ Kemudian konsep “**Konstruktivisme**” adalah sebuah konsep menekankan terhadap pola interaksi yang dibentuk oleh beberapa unsur lain seperti norma, identitas, intensi, dan bahasa yang menjadi bagian penting dari proses historis hubungan antar subjek.¹² Dalam karyanya yang berjudul “*Rules, Norms, and Decisions: On the Conditions of Practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs*”, Friedrich Kratochwill berpendapat jika pengkonstruksian untuk hidup berdampingan sebagai komunitas internasional merupakan bentuk dari “proses pembelajaran” interaksi yang dilakukan antar subjek, dan dipengaruhi oleh aspek **identitas (*identity*)**, **kepentingan (*interests*)**, **nilai-nilai (*values*)**, dan **maksud (*intention*)** yang kemudian membentuk suatu hubungan tertentu sebagai “kawan” atau “lawan”.¹³ Selain Kratochwill Nicolas Onuf seorang filsuf Jerman juga ikut berpartisipasi

¹¹ Christopher Hill (2016), *Foreign Policy in the Twenty-First Century* (New York: Palgrave), hal 2

¹² Bob Sugeng Hadiwinata (2017), “Studi dan Teori Hubungan Internasional Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.), hal 260

¹³ Friedrich Kratochwill (2019), “*Rules, Norms, and Decisions: On the Conditions of Practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs*”, (Cambridge: Cambridge University Press), hlm 20-25

mengembangkan teori konstruktivis. Onuf dalam karyanya yang berjudul “*World of our Making*” berpendapat jika pemikiran konstruktivis dipengaruhi oleh “*The Linguistic Turn*” yang didalamnya membahas tiga hal. **Pertama**, adanya “**bahasa**” yang memiliki fungsi konstitutif, dimana apa yang dibicarakan dan diterima oleh pihak lain dapat membentuk dunia yang dipersepsikan. **Kedua**, “**Perkataan**” atau yang dikenal sebagai *speech act* dan berbagai turunannya berupa kebijakan dan aturan yang dijadikan media konstruksi sosial sehingga menempatkan manusia sebagai agen dalam penggunaan simbol-simbol linguistik. **Ketiga**, “**media**”, perlu diketahui jika bahasa mampu mentransformasi berbagai materi yang ada untuk menjadi sumber daya sehingga berpotensi menciptakan keselarasan dalam hal kendali dan pengiriman informasi yang nantinya akan dimanfaatkan oleh masing-masing subjek.¹⁴ Singkatnya Nicolas Onuf menganggap apabila pentingnya sebuah bahasa dalam teori konstruktivisme sebagai media dalam membentuk persepsi hubungan antar subjek yang kemudian membentuk suatu hubungan “pertemanan” atau “permusuhan”. Kemudian Alexander Went menambahkan apabila adanya transformasi dari sistem “rivalitas” ala John Locke menuju sistem “persahabatan dan kerja sama” ala Immanuel Kant dengan diikuti tiga variable utama diantaranya:

(1) **saling ketergantungan (*interdependence*)** yang membuat negara semakin erat dalam aspek kerja sama sehingga saling menguntungkan satu sama lain; (2) **perasaan sepananggungan (*common fate*)** yang membentuk adanya rasa persatuan di tingkat regional dan global; dan (3) **kesamaan identitas (*homogeneity*)** yang membuat negara harus bisa saling memahami dan menerima perbedaan.¹⁵

¹⁴ Nicolas Onuf (1989). “*World of Our Making. Rules and Rule in Social Theory and International Relations*”, (Columbia: University of South Carolina Press), hlm. 18-23

¹⁵ *Loc Cit*, hal 268

Kerangka pemikiran berikutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep “**Liberalisme**”. Dalam konsep liberalisme diyakini apabila sistem perekonomian kapitalisme pasar bebas (*free market capitalism*) dapat menjamin kemakmuran bersama serta dapat mengalokasikan sumber-sumber secara efisien di dalam Masyarakat.¹⁶ Kemudian Immanuel Kant dalam karyanya yang berjudul *Perpetual Peace: a Philosophical Essay* ia membagi opini bagaimana suatu perdamaian dapat tercipta di suatu negara kedalam tiga argumentasi, dari tiga bagian tersebut peneliti hanya berfokus kedalam dua argumentasi yang dianggap relevan dalam penelitian ini:¹⁷

- **Pertama**, bagian ini membahas bagaimana perdamaian harus senantiasa diperjuangkan dan peperangan harus dihindari, lebih rinci nya lagi ia menjelaskan argumen tersebut kedalam enam pokok pemikiran: **(1) sikap anti perang**, setiap kesepakatan atau perjanjian antar-bangsa harus didasarkan pada keinginan kuat untuk menghindari peperangan; **(2) prinsip anti dominasi asing**, setiap negara merdeka baik itu besar atau kecil tidak boleh dikuasai oleh negara lain dalam hal perdagangan, finansial, terutama militer; **(3) prinsip demiliterisasi**, negara mau tidak mau harus rela

mengurangi atau bahkan meniadakan kekuatan militernya apabila suasana saling mengancam sudah mereda dan perdamaian abadi sudah ditegakkan;

(4) pemisahan antara masalah ekonomi dengan hubungan militer, negara-

¹⁶ Scott Burchill (2005). “*The National Interest in International Relations Theory*”, (Basingstoke: Palgrave Macmillan), hlm.55

¹⁷ *Loc Cit*, hal 81-83

negara diharapkan untuk tidak mensangkut-pautkan hutang luar negeri dengan militer; dan **(5) prinsip non-kekerasan**, tidak satu negara boleh menunjukkan sikap permusuhan yang dapat mengancam prospek perdamaian.

- **Kedua**, berbicara mengenai bagaimana mewujudkan perdamaian abadi dalam politik internasional, Immanuel Kant mengatakan apabila perdamaian abadi akan terjadi secara otomatis jika negara-negara sebagai aktor utama politik internasional secara sadar mengembangkan dirinya dalam tiga komponen penting politik internasional, diantaranya: **demokrasi** (*democracy*) yang menjunjung tinggi penegakan hukum, toleransi, dan adanya *check and balances* antara lembaga-lembaga negara telah mampu mencegah negara demokratis untuk terlibat peperangan, **saling ketergantungan ekonomi** (*economic independence*) dimana membuat negara memberikan prioritas bagi kerja sama dengan negara lain dan pada gilirannya untuk mengurangi dorongan untuk berperang, **dan organisasi internasional** (*international organizations*) dalam mengkonversi kepentingan nasional menjadi kepentingan bersama sehingga masing-masing negara mulai tersadarkan akan pentingnya kerja sama.

Dalam konsep liberlisme terdapat juga empat dimensi perspektif liberalisme yang harus dipertimbangkan oleh seluruh aktor dan pengamat politik internasional untuk mencapai hubungan internasional yang ideal, diantaranya adalah; **(1) positive peace** (perdamaian positif), **(2) the spirit of commence** (semangat komersial) dalam politik ekonomi internasional, **(3) interdependence** (saling ketergantungan) dan **institutionalism** (institusionalisme) dalam kerja sama regional dan

internasional, dan (4) pentingnya penegakan prinsip hak asasi manusia.¹⁸

- *Positive Peace*, menurut Immanuel Kant peradaban manusia ditentukan oleh hukum alam dimana hakikat manusia penuh dengan harmoni dan kerja sama sehingga dapat membentuk perdamaian abadi. Selain itu ia berpendapat meskipun seorang individu atau negara pada dasarnya memiliki karakter keras kepala, namun mereka masih dapat belajar untuk mengembangkan sikap bagaimana untuk bisa saling berinteraksi secara damai di bawah naungan *world federation* atau *world government*.

- *The Spirit of Commerce*, kesadaran akan kondisi autarki (ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri) sehingga membuat negara-negara merasa perlu untuk menjalin hubungan satu sama lain. Bagi kelompok liberalis perdagangan bebas merupakan cara damai untuk mencapai kesejahteraan nasional. Dalam perekonomian modern pada hakikatnya tidak ada negara yang sanggup memenuhi segala kebutuhannya akan sumber daya alam-pangan, energi, dan bahan tambang. Sehingga semangat komersial akan mendorong arus perdagangan bebas yang memicu rasa saling ketergantungan antar negara.

- *Interdependence dan Institutionalism*, pakar liberal David Mitrany di dalam bukunya *The Functional Theory of Politics* pada tahun 1976 mengatakan bahwa dalam suasana kerja sama antar negara yang makin meningkat, maka suatu kerja sama akan dikategorikan sukses sehingga akan menimbulkan *spill-over effect*, yaitu penularan ke bidang fungsional lainnya seperti kerja sama sektor energi, sumber daya alam, perdagangan. Dalam konteks ini sehingga terjadinya proses saling ketergantungan (*interdependence*) dimana negara-negara

¹⁸ *Ibid*, hlm 87-94

makin terdorong untuk memperluas lingkup kerja sama dan bertumbuhnya semangat institusionalisme (*institutionalism*).

- **Penegakan Prinsip Hak Asasi Manusia**, beberapa peristiwa penting di dunia pasca Perang dingin seperti keterlambatan masyarakat internasional dalam mencegah bencana kemanusiaan seperti kejahatan genosida di Bosnia, Kosovo, dan Rwanda membuat para pakar dan pemimpin dunia merasa perlu mengangkat kembali isu hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik mereka. Berkaca dari kasus Rwanda-Burundi pemerintah Kanada mengusulkan prinsip R-to-P (*Responsibility to Protect*). Pada dasarnya R-to-P memberi otoritas bagi pasukan asing (gabungan maupun secara sepihak) untuk melakukan intervensi kemanusiaan dalam situasi yang di fokuskan ke arah **kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, kejahatan genosida, dan pembersihan etnis.**

Kerangka pemikiran selanjutnya yang digunakan adalah “**Neoliberal- Institusionalisme**”. Konsep ini lahir ketika mulai banyak bermunculan organisasi internasional dimana peristiwa tersebut menunjukkan bahwa semangat kerja sama internasional melalui berbagai organisasi baik internasional ataupun regional semakin tumbuh dan berkembang. Konsep Neoliberal-Institusionalisme merupakan konsep yang juga menerapkan kembali gagasan liberalisme klasik dalam konteks organisasi internasional dan regional yang pertama kali dikenalkan oleh Immanuel Kant dalam *Perpetual Peace: A Philosophical Essay*.¹⁹

Beberapa karya yang memberikan pengaruh terhadap konsep Neoliberal-Institusionalisme diantaranya adalah; “***Beyond the Nation State: Functionalism and International Organization***” yang ditulis oleh Ernst B. Haas pada tahun 1964 dimana ia berpendapat apabila sikap negara yang cenderung terlibat dalam perang

¹⁹ *Ibid*, hlm 95

dapat diredam dengan cara melakukan berbagai aktivitas kerja sama yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan dengan melibatkan para ahli teknik atau ekonom ketimbang politisi.²⁰

Karya selanjutnya merupakan karya yang ditulis oleh Robert Keohane dan Joseph Nye dengan judul “***Power and Interdependence***” dimana dalam karya tersebut dikenalkan istilah *interdependence* (saling ketergantungan) yang mendominasi hubungan antar negara, ketika negara-negara di dunia saling terikat dalam hubungan ekonomi khususnya sektor perdagangan, investasi, energi, keuangan, dan teknologi yang saling menguntungkan (*mutual benefit*). Dalam konteks ini maka secara otomatis sistem internasional akan mengarah kepada karakter “**saling ketergantungan yang kompleks**” (*complex interdependence*) dengan diikuti oleh tiga unsur penting; (1) ***multiple channels***, dimana jaringan hubungan yang kompleks antar negara, organisasi internasional, korporasi transnasional, birokrasi, dan masyarakat yang ikut menentukan arah politik dunia; (2) ***multiple issues***, adanya hubungan antar bangsa-bangsa yang bernuansa majemuk dengan berbagai isu yang saling tindih satu sama lain sehingga membuat rasa saling ketergantungan dan mematahkan argumen kelompok dasar Realisme, jika negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional. Sehingga dalam situasi ini, aktor-aktor hubungan internasional perlu melakukan koordinasi kebijakan (*policy coordination*) untuk menjaga ketertiban dunia; dan (3) ***decreasing role of military power***, dalam situasi ketergantungan yang kompleks, penggunaan armada

²⁰ Erns B. Haas (1964). “*Beyond the Nation State: Functionalism and International Organization*” (Stanford University Press), hlm 11

militer sebagai instrumen penggetar terhadap negara lain semakin berkurang dengan digantikan oleh inovasi dalam bidang teknologi dan kekuatan bidang ekonomi.²¹ Sehingga dari beberapa pemaparan karya-karya mengenai Neoliberal-Institusionalisme bisa disimpulkan apabila konsep ini mencakup tiga unsur penting didalamnya. **Pertama**, Neoliberal-Institusionalisme mengakui bahwa stabilitas politik internasional adalah syarat utama bagi terbentuknya kerja sama saling menguntungkan antar negara dapat diciptakan dalam situasi *balance of power* di bawah kepemimpinan dua negara *super power*. **Kedua**, ada kesepakatan antara Neoliberal-Institusionalisme dengan Realisme/Neorealisme dalam hal upaya pemenuhan kepentingan nasional oleh suatu negara adalah hal yang normal, sehingga kerja sama global dan regional harus dikembangkan dalam rangka kepentingan nasional bagi anggotanya, dan **Ketiga**, Neoliberal-Institusionalisme kembali sepakat dengan Realisme/Neorealisme apabila politik internasional pada dasarnya memiliki karakter anarki, namun perilaku rasional negara akan membuat negara yang paling egosentrik sekalipun merasa perlu bekerja sama di sektor-sektor fungsional seperti transportasi, komunikasi, perdagangan, teknologi, kesehatan, pengadaan energi, dan sebagainya mengingat banyak di antara mereka tidak dapat memenuhi hal tersebut secara sendiri.²²

Kerangka Pemikiran selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah “**reunifikasi/integrasi**”. Apabila mengacu terhadap definisi pada umumnya, reunifikasi adalah bersatu kembalinya suatu wilayah terpisah yang diakibatkan oleh

²¹ Robert O Keohane, Joseph S. Nye (2001) “*Power and Independence*”, hlm 24-25

²² *Loc Cit*, Hlm 100

konflik. Kalimat reunifikasi biasanya digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antara negara-negara, negara bagian, atau wilayah teritorial.²³ Pada dasarnya konsep reunifikasi difokuskan kedalam konsep integrasi politik dimana berbicara mengenai faktor-faktor yang bertanggung jawab atas pengembangan hubungan damai antara negara dan masyarakat.²⁴ Pada umumnya konsep integrasi mengacu terhadap proses dimana suatu negara bergabung dengan satu negara lainnya menjadi unit yang sangat besar dimana akan berpengaruh terhadap kehidupan di dalamnya, serta terciptanya lingkungan politik yang baru dan lebih luas.²⁵ Untuk mengetahui bagaimana dinamika *political process* yang harus dilalui di dalam proses reunifikasi, penulis menggunakan tiga hipotesis yang diambil dari karya-karya yang ditulis oleh Augelli, Hartshorne, dan Bucholz.

Hipotesa pertama “Winners- and- Losers”, berasal dari karya yang ditulis oleh Augelli pada tahun 1980 yang berjudul “*Trujillo Regime’s Nationalization of the Dominican Borderlands*”. Hipotesis ini menyatakan apabila ketika negara yang terpisah dipersatukan kembali. Maka akan ada partai yang mendominasi dan juga partai yang dianggap tidak dominan. Hipotesa ini menggambarkan ketika kelompok-kelompok elit yang terdapat di dalam negara yang terpisah seperti orang-orang pemerintahan, militer, pebisnis, akademisi, dan orang kaya menjadi kelompok dominan menjadi di negara yang telah berhasil disatukan dengan

²³ *Reunification Definition* diakses dari <https://www.vocabulary.com/dictionary/reunification#:~:text=Coming%20back%20together%20a gain%20after,to%20war%20against%20each%20other>. Pada tanggal 14 Agustus 2023

²⁴ Michael Haas. “*Paradigm of Political Integration and Unification: Applications to Korea*”. Department of Political Science, University of Hawaii. Maret 1984,

²⁵ Paul Sharp (2009) “*Diplomatic Theory of International Relations*” (Cambridge University Press), hlm 123

mengorbankan kelompok elit negara lain. Sementara kelompok partai dominan akan menderita akibat dampak negatif yang diakibatkan oleh reunifikasi, mulai dari hilangnya status dan prestise, hingga penganiayaan oleh kelompok elit yang dominan. Sementara dampak geografis yang ditimbulkan dari hipotesis ini adalah terciptanya pembagian kelas antara kelas-satu (pemenang) dan kelas-kedua (pecundang).²⁶

Hipotesa kedua “*Persistent Dissimilarities*” berdasarkan bukti yang berasal dari studi tentang efek jangka panjang dari batas-batas yang mengakar sebagai fitur *landscape* yang dilakukan oleh Hartshorne pada tahun 1936. Hipotesis ini menyatakan apabila perbedaan sosial dan budaya terkadang akan muncul setelah proses reunifikasi dan akan mengakibatkan stress dalam kelompok masyarakat yang baru bersatu kembali. Hal tersebut disebabkan oleh puluhan tahun hidup dalam kondisi masyarakat, politik, dan ekonomi yang berbeda sehingga menghasilkan perbedaan pandangan, gaya hidup, dan harapan di antara masyarakat dari negara yang baru bersatu kembali.²⁷

Hipotesa ketiga “*Borderlands to Centrality*” berdasarkan pemikiran yang dituangkan oleh Buchholz dalam penelitiannya tentang dampak penghapusan perbatasan di dalam Jerman pada tahun 1991. Hipotesis ini mengatakan apabila daerah perbatasan yang sebelumnya terpinggirkan akan menjadi daerah pusat dan berkembang menjadi pusat sirkulasi. Disaat aktivitas militer akan berkurang di daerah tersebut, sebaliknya aktivitas politik dan ekonomi akan meningkat secara

²⁶ Mark W. Corson & Julian V. Minghi. “*Reunification of Partitioned Nation-States: Theory Versus Reality in Vietnam and Germany*”. *Journal of Geography*. 11 September 2007, hlm 125-126.

²⁷ *Ibid*, Hlm 127

signifikan. Selanjutnya pemerintah pusat juga akan membangun kembali hubungan dengan daerah pedalaman yang sebelumnya dipisahkan oleh perbatasan.²⁸

Kerangka pemikiran berikutnya yang digunakan pada penelitian ini ialah **“Kebijakan Luar Negeri”**. Kebijakan luar negeri menurut Jean- Frederic Morin dan Jonathan Paquin adalah seperangkat tindakan atau aturan yang mengatur tindakan otoritas politik independent yang ditempatkan dalam lingkungan internasional, selain itu kebijakan luar negeri juga mengacu kepada tindakan atau aturan-aturan yang dimiliki oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya.²⁹ Adapun menurut Mark R. Amstutz kebijakan luar negeri adalah tindakan pemerintah yang secara implisit maupun eksplisit dirancang untuk memperkenalkan kepentingan nasional terhadap lingkungan internasional.³⁰ Menurut Webber dan Smith kebijakan luar negeri adalah sebuah produk kebijakan yang terdiri dari upaya mencapai tujuan, nilai, pengambilan keputusan, serta tindakan yang diambil oleh negara.³¹

Mengenai level analisis kebijakan luar negeri dalam buku *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory* oleh Valerie M Hudson disebutkan apabila *level of analysis* dari kebijakan luar negeri adalah: **Psikologi Politik Pemimpin, Kelompok Pembuat Keputusan, Budaya dan Identitas, Kontestasi Politik**

²⁸ *Ibid*, Hlm 129

²⁹ Jean- Frederic Morin, Jonathan Paquin (2018), *Foreign Policy Analysis A Toolbox* (Quebec: Palgrave Macmillan), hal 3

³⁰ Mark R Amstutz (1995), *International Conflict and Cooperation: An Introduction to World Politics (Dubuque: Brown and Benchmark)*

³¹ Mark Webber and Michael Smith (2002), *Foreign Policy in Transformed World*, (London: Prentice Hall) hal. 11-12

Domestik, Atribut Nasional, dan Sistem Regional dan Internasional.³²

Selanjutnya dalam hal implementasi kebijakan publik luar negeri, kalimat implementasi memiliki dua aspek yang berbeda: **pertama**, kapasitas untuk melakukan apa yang ditujukan, memberikan kapabilitas dan instrument-instrumen kepada orang yang tepat, dan **kedua**, menjelaskan mengenai perbedaan antara keputusan politik dan pengekseskuan administratif dimana aspek kedua ini sangat dekat sekali hubungannya dengan permasalahan birokrasi politik. Dalam buku *Foreign Policy in the Twenty-First Century* yang ditulis oleh Christopher Hill ia menyebutkan dalam implementasi kebijakan publik luar negeri terdapat 7 aspek utama didalam nya seperti;³³

The Faces of Power, kekuasaan biasa merepresentasikan pandangan tentang politisi dan motif mereka, para politisi tersebut dituntut untuk memaksimalkan kondisi psikologis mereka untuk kepuasan psikologis yang biasanya terlibat dalam mengendalikan orang lain, untuk mendapatkan kemenangan, uang, dan peluang yang selalu menyertainya. Akan tetapi apabila politisi tersebut bertindak mewakili negara, mereka tidak peduli akan hal tersebut.

The Texture of Power, dalam aspek ini akan dijelaskan perbedaan mengenai *hard power* dan *soft power*. *Hard Power* cenderung bersifat memaksa, menggunakan fisik, terarah, dan sering kali langsung. Sementara untuk *soft power* bersifat tidak langsung, memiliki jangka panjang, lebih banyak bekerja melalui kooptasi,

³² Valerie M. Hudson (2014), *Foreign Policy Analysis Second Edition: Classic and Contemporary Theory* (Plymouth: Rowman & Littlefield)

³³ Christopher Hill (2016), *Foreign Policy in the Twenty-First Century Second Edition*, (Palgrave: New York) Hal 139-166

persuasi, dan memiliki kekuatan daya tarik.

The Military Arm, perlu diingat apabila melibatkan militer adalah instrument yang relatif kasar dan keras sehingga bagi sebagian negara keberhasilan dalam sistem pemerintahan mereka biasanya sudah tidak menggunakan mereka lagi. Sehingga dewasa ini militer telah menjadi birokratis dan menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

Economic Statecraft, aspek ini menganalisis sejauh mana instrument ekonomi yang dimiliki oleh negara, biasanya hal yang dipertanyakan pada aspek ini adalah bagaimana memanfaatkan aspek ekonomi yang telah ada melalui perdagangan, investasi, atau bantuan Pembangunan.

Diplomacy, diplomasi merupakan langkah yang diambil oleh manusia untuk melindungi kepentingannya di dalam politik internasional, sama krusialnya sebagai instrumen untuk membangun stabilitas internasional. Terdapat 4 fungsi yang bisa dilakukan melalui diplomasi untuk aktor internasional yaitu **komunikasi, negosiasi, partisipasi dalam lembaga multilateral, dan mempromosikan produk-produk ekonomi.**

Culture, dalam aspek budaya ada juga yang disebut *cultural diplomacy*, adalah salah satu bentuk dari *soft power* dimana langkah ini dimobilisasi oleh pemerintah dan mengambil pandangan jangka panjang yang mungkin terjadi. Layaknya propaganda kegiatan ini menjadikan opini publik di negara lain sebagai target utama. Tujuannya bisa jadi untuk melemahkan sebuah rezim yang sedang berkonflik, menyebarkan nilai-nilai sendiri, atau hanya untuk mempromosikan tujuan ekonomi.

Seeking Balance, sama halnya seperti *soft power* dan *cultural diplomacy*, aspek *seeking balance* dianggap semakin penting dalam meningkatkan opini publik dan bidang ekonomi. Ketika pembuat kebijakan mencoba untuk memanfaatkan produk-produk dari kelompok masyarakat mereka harus menghadapi resiko skeptisisme dari dalam dan luar negeri, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap aset-aset budaya, dan perencanaan pertahananpun memerlukan investasi yang jangka panjang

Selanjutnya untuk menganalisa kondisi psikologis yang melatar belakangi proses perumusan kebijakan luar negeri *Sunshine Policy* dan melihat pemahaman mengenai konsep reunifikasi Korea Selatan dengan Korea Utara oleh presiden Moon Jae-in, maka dari itu peneliti akan memasukan teori *the big five personalities* dan konsep *type of leadership*.

Teori *the big five personalities* adalah teori yang digagas oleh Robert R McCrae dan Paul T. Costa Jr. Teori ini memiliki lima dimensi yang diantaranya adalah *Neuroticism (N)*, *Extraversion (E)*, *Openness (O)*, *Agreeableness (A)*, dan *Conscientiousness (C)*. *Neuroticism* merupakan sifat yang dimiliki individu yang berkaitan dengan kecemasan, *Extraversion* berkaitan dengan bagaimana orang tersebut bersosialisasi, *Openness* tingkat keterbukaan seseorang terhadap pengalaman yang baru, *Agreeableness* merupakan karakteristik yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan terhadap orang lain, dan yang terakhir adalah *conscientiousness* adalah sifat yang menjelaskan keteraturan serta ketelitian. Individu dengan tingkat *neuroticism* yang tinggi cenderung akan mudah gelisah dan memiliki sifat temperamental, kondisi sebaliknya apabila individu dengan

neuroticism yang tingkatnya rendah akan lebih tenang dan stabil dalam pengendalian emosinya. Kemudian individu yang memiliki tingkat *extraversion* yang tinggi maka ia akan cenderung aktif dalam berbicara serta mudah berbaur, sedangkan sebaliknya apabila aspek ini rendah maka individu ini akan cenderung memiliki sifat yang pendiam, penyendiri, dan pasif. Pada aspek *openness* apabila seorang individu memiliki sifat tersebut dengan tingkat yang tinggi maka ia adalah orang yang cenderung penasaran dan gemar mencari pengalaman baru, namun sebaliknya apabila tingkatnya berada pada posisi rendah maka individu tersebut cenderung konservatif dan cenderung memiliki kehidupan yang tetap (tidak ada perubahan). Selanjutnya adalah *agreeableness* dimana apabila seorang individu mempunyai tingkat tinggi pada aspek tersebut maka ia mudah percaya dan dewasa, sebaliknya apabila rendah maka akan sering sekali mudah curiga dan kritis terhadap sesuatu atau individu. Terakhir adalah *conscientiousness* dimana individu yang mempunyai tingkat tinggi dalam aspek tersebut adalah pribadi yang teratur, ambisius, dan disiplin, sebaliknya apabila rendah maka ia cenderung tidak teratur, lalai, dan malas.³⁴

Selanjutnya adanya penggunaan konsep *Type of Leadership* yang dikemukakan oleh Thomas Preston dalam bukunya yang berjudul "*The President and His Inner Circle*" pada tahun 1994 dimana salah satu dimensinya adalah kebutuhan terhadap kekuasaan dan keterlibatan dalam pembuatan kebijakan yang terdapat empat kategori. Kategori pertama adalah *director* dimana tipe ini menjelaskan apabila seorang presiden yang memiliki sifat kebutuhan akan kekuasaan dan keterlibatan

³⁴ Jess Feist, Gregory J. Feist. *Theories of Personalities Seventh Edition*. (The McGraw-Hill Companies, Inc. 2008). Hal. 421-423.

yang sangat tinggi. Kategori kedua adalah *magistrate* dimana tipe ini menjelaskan seorang presiden yang memiliki kekuasaan tinggi namun minim keterlibatan. Kategori ketiga adalah *administrator* dimana tipe ini menjelaskan presiden yang memiliki tingkat yang rendah dalam hal kebutuhan kekuasaan namun memiliki keterlibatan yang tinggi. Terakhir kategori keempat adalah *delegator* dimana menjelaskan tipe seorang presiden yang memiliki kebutuhan akan kekuasaan rendah dan keterlibatan yang juga rendah.³⁵

1.7 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.7.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode penelitian tersebut didasari atas rumusan masalah yang sudah peneliti sebutkan sebelumnya yaitu **“Sejauh mana faktor-faktor ideosinkretik Presiden Moon Jae-in mempengaruhi proses reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara?”** Metode penelitian kualitatif dinilai dapat membantu peneliti untuk memunculkan *new understanding* dan menjelaskan bagaimana proses terjadinya suatu kasus yang menjadi objek penelitian; dalam kasus ini, tentang keterkaitan hubungan antara faktor kepribadian seorang pemimpin negara (presiden) dengan proses perumusan suatu kebijakan luar negeri dan pemahamannya mengenai unifikasi. Selanjutnya adapun juga penggunaan metode penelitian kualitatif secara khusus yang digunakan adalah metode analisis **psikobiografi**, yakni metode yang digunakan untuk menganalisis kepribadian individu dengan menggunakan

³⁵ Thomas Preston. *The President & His Inner Circle* (New York: Columbia University Press, 2001), hal. 15-19

beberapa data pendukung seperti biografi, atau informasi lainnya yang dinilai dapat memberikan gambaran mengenai kepribadian individu yang diteliti. Selain itu metode tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui bagaimana kepribadian

dan proses terbentuknya kepribadian dari seorang individu pemimpin, yang dimulai sejak masa kecil, remaja, hingga dewasa.³⁶

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sejalan dengan teknik metode penelitian yang dilakukan dengan penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan metode pengumpulan dokumen dan informasi yang bersifat *digital* berasal dari internet. Perlu diingatkan kembali apabila data yang diperlukan dan digunakan oleh peneliti bersifat subjektif, dan data-data tersebut bisa ditemukan dalam biografi, jurnal, artikel, *website*, dan sumber lainnya yang sekiranya dinilai dapat mendukung. Selanjutnya data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber kemudian diolah sehingga menjadi analisis yang bersifat deskriptif, dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bagian.

1.8 Sistematika Pembahasan

BAB I: LATAR BELAKANG

Pada BAB I dalam penelitian tesis ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka

³⁶ *OpCit*, Hlm 32-33

pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan. Sederhana nya BAB I akan memberikan penjelasan tentang pentingnya penelitian ini untuk dikaji secara merinci.

BAB II: PROFIL PSIKOBIOGRAFI PRESIDEN MOON JAE-IN

Pada BAB II dalam penelitian tesis ini menjelaskan mengenai faktor psikologis dan *type of leadership* Presiden Moon Jae-in, khususnya terhadap perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri *Sunshine Policy* tahun 2018- 2020 sebagai upaya merealisasikan reunifikasi antara Korea Selatan dan Korea Utara. UNTUK MENGGAMBARAKAN PROFIL PSIKOLOGIS MOON JAE-IN

BAB III: PERSOALAN REUNIFIKASI KOREA SELATAN DAN KOREA UTARA MELALUI KEBIJAKAN LUAR NEGERI *SUNSHINE POLICY*

Pada BAB III penelitian tesis ini menjelaskan mengenai perbandingan pengimplementasian *sunshine policy* baik yang dilakukan oleh presiden Kim Dae-jung, presiden Roh Moo-hyun, hingga presiden Moon Jae-in. Serta pemahaman seorang Moon Jae-in terhadap konsep reunifikasi, *political process* dan hambatan yang tercipta dalam proses reunifikasi antara Korea Selatan dan Korea Utara

BAB IV: RELEVANSI PSIKOLOGI MOON JAE-IN TERHADAP IMPLEMENTASI *SUNSHINE POLICY*

Pada BAB IV tesis ini menjelaskan mengenai relevansi antara faktor psikologis Presiden Moon Jae-in terhadap terhadap perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri *Sunshine Policy* tahun 2018-2020 sebagai upaya merealisasikan reunifikasi antara Korea Selatan dan Korea Utara

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB V tesis ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang juga merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian serta saran yang diberikan secara umum dan secara khusus bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini lebih merinci kedepannya.